

## PERAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA DALAM PENGEMBANGAN UMKM “KENDANG JIMBE” DI KOTA BLITAR

**Rika Nurhayati<sup>1</sup>, Ananta Prathama<sup>2</sup>**

Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

rikanrhyt@gmail.com<sup>1</sup>, prathama.ananta@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*UMKM's are business units that are widely developed in developing countries, including Indonesia. The city of Blitar, precisely in Kepanjenkidul District, has the UMKM “Kendang Jimbe” which is a typical traditional musical instrument that has various achievements such as entering the top 10 national awards, marketing “Kendang Jimbe” which penetrates local and international markets, and can absorb labor. The development of “Kendang Jimbe” UMKM's in Kepanjenkidul District cannot be separated from the role of the Blitar City Government through the Blitar City Cooperatives and UM Offices in carrying out their duties and functions, one of which is to develop UMKM's including “Kendang Jimbe” UMKM's. The purpose of this study was to determine the role of the Department of Cooperatives and Micro Enterprises in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM's) “Kendang Jimbe” in Kepanjenkidul District, Blitar City. The method used in this research is descriptive qualitative, which describes the role played by the Department of Cooperatives and UM in the City of Blitar in its efforts to develop UMKM's “Kendang Jimbe” in Kepanjenkidul District, Blitar City. The results of this study are expected to add to the scientific treasures of public administration in particular regarding the role of the Department of Cooperatives and Micro Enterprises in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM's) “Kendang Jimbe” in Kepanjenkidul District, Blitar City.*

**Keyword:** *UMKM, Role, Blitar*

### Abstrak

UMKM merupakan unit usaha yang banyak dikembangkan di negara berkembang termasuk Indonesia. Kota Blitar tepatnya Kecamatan Kepanjenkidul memiliki UMKM “Kendang Jimbe” yang merupakan alat musik tradisional khas yang memiliki beragam prestasi seperti masuk kedalam 10 besar penghargaan nasional, pemasaran “Kendang Jimbe” yang menembus pasar lokal maupun internasional, serta dapat menyerap tenaga kerja. Berkembangnya UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan tugas dan fungsi salah satunya untuk mengembangkan UMKM termasuk di dalamnya UMKM “Kendang Jimbe”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga



Kerja dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana menggambarkan peran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam upaya mengembangkan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan administrasi publik secara khusus mengenai peran Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

**Kata kunci:** UMKM, Peran, Blitar

## PENDAHULUAN

Berdasarkan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengurus daerahnya, termasuk dalam hal perekonomian daerah. Perekonomian daerah dapat mencapai kesejahteraan dengan cara menggali dan memaksimalkan potensi daerah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan potensi daerah melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri merupakan unit usaha yang banyak dikembangkan di negara berkembang termasuk Indonesia.

Secara umum UMKM merupakan jenis usaha dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana, tingkat dan akses terhadap kredit rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal (Irawan, 2018). Dengan kontribusinya dalam perkembangan perekonomian suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tahun 2004 sebagai tahun International Microfinance. Sehubungan dengan langkah PBB menetapkan International Microfinance, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tahun 2005 sebagai tahun UMKM Indonesia dengan melakukan berbagai instrumen dan program yang memfasilitasi pemberdayaan UMKM ditingkat nasional yang kemudian diteruskan dengan pemberian fasilitas pengembangan UMKM sesuai dengan potensi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Melihat peran UMKM yang besar dan

langkah yang telah ditetapkan oleh PBB, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, serta memberi perlindungan terhadap UMKM dengan menetapkan kebijakan mengenai pencadangan usaha, pendanaan usaha, dan pengembangannya. Kebijakan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada pasal 16 ayat (1) berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi dalam rangka pengembangan UMKM.

Kebijakan yang diambil diharapkan dapat melancarkan pengembangan UMKM di daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dengan difasilitasi dan didukung oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu UMKM yang berkembang di Indonesia adalah UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. “Kendang Jimbe” merupakan alat pukul musik yang biasa digunakan untuk alat musik khas komunitas tertentu (rege), acara keagamaan, pendukung alat musik modern, sampai sebagai pajangan atau hiasan dalam suatu ruangan (Fernando, Choiri, & Yanuarti, 2013).

UMKM “Kendang Jimbe” telah berhasil meraih beberapa prestasi. Dikutip dalam (Subiantoro, 2019) tercatat pada tahun 2013, UMKM yang bergerak dibidang Usaha Industri

Kayu dan Barang Kayu Jadi dari Kota Blitar yaitu UD. Budi Luhur yang merupakan unit usaha yang menekuni bidang “Kendang Jimbe” berhasil masuk ke dalam kategori 10 besar penerima Penghargaan Produktivitas Paramakarya.

Kemudian pemasaran “Kendang Jimbe” sendiri sudah berhasil menembus pasar lokal dengan pusat penjualan lokal di Pulau Bali. Selain pasar lokal, pemasaran “Kendang Jimbe” juga sudah berhasil menembus pasar internasional. Seperti tertera dalam (Subiantoro, 2019) pemasaran “Kendang Jimbe” yang menembus pasar internasional dibuktikan dengan berhasilnya para pelaku usaha memasarkan “Kendang Jimbe” di beberapa Negara di Asia dan Eropa seperti Thailand, Turki, China, Chili, dan Tunesia Setiap minggunya sekitar 20.000 buah “Kendang Jimbe” dihasilkan dan siap didistribusikan ke negara-negara pemesan. Prestasi lain yang diraih oleh “Kendang Jimbe” dari Kecamatan Kepanjenkidul ini adalah keberhasilannya dalam menyerap tenaga kerja. Dikutip dalam (Irawan, 2018) industri dibidang kerajinan “Kendang Jimbe” ini paling banyak adalah home industry sehingga meningkatkan produktivitas masyarakatnya serta menyerap tenaga kerja. Keberadaan “Kendang Jimbe” yang memiliki banyak prestasi berhasil membuktikan bahwa Kota Blitar telah mampu mengelola UMKM dengan memaksimalkan potensi daerahnya. Keberhasilan yang di raih oleh UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tentu saja tidak bisa lepas dari peran pemerintah daerahnya. Lembaga pemerintah daerah yang memiliki wewenang atas pengembangan UMKM di Kota Blitar adalah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Namun kita perlu mengetahui sejauh mana peran Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam sebuah pengembangan UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Siagian, 2018) menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan nasional yang

didalamnya termasuk pula pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui peran sebagai stabilisator, peran inovator peran modernisator, dan peran pelopor.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap Peran Dinas Koperasi, Ukm, Dan Tenaga Kerja Dalam Pengembangan Umkm “Kendang Jimbe” Di Kota Blitar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan dan menjabarkan peran Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam pengembangan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian adalah di Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 85, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar serta di tempat pelaku usaha “Kendang Jimbe”. Sedangkan waktu penelitian adalah pada bulan april hingga mei 2022. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan merupakan metode yang dikembangkan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang dikutip dalam (Nugraha, 2020) dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data Condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing or verification*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pembangunan daerah yang dapat dilakukan adalah pembangunan perekonomian. Berkembangnya sebuah UMKM sesuai potensi daerah yang ada dapat menjadi indikator keberhasilan suatu pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar memiliki tugas pokok dan fungsi dimana salah satunya adalah melakukan pengembangan terhadap UMKM “Kendang Jimbe”. Kemudian dari hasil penelitian di lapangan berdasarkan pada konsep teori yang dikemukakan oleh (Siagian, 2018) bahwa peran pemerintah dalam pembangunan nasional yang didalamnya terdapat pembangunan perekonomian adalah dengan menjalankan peran sebagai stabilisator, inovator, modernisator, dan juga peran pelopor.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti antara tanggal 12 April 2022 hingga 18 Mei 2022 bersama dengan pihak Dinas Koperasi, UKM, dan tenaga Kerja yang diwakili oleh Ibu Sri Mubayana selaku staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Bapak Dikdo selaku ketua Asosiasi Usaha Mikro (ASUMI), Bapak Purwanto dan Ibu Susi selaku pelaku usaha “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah ditemukan hasil sesuai fokus penelitian yaitu :

### **1. Peran Sebagai Stabilisator**

Sebagai stabilisator berarti menciptakan kondisi yang berubah secara dinamis bergantung pada kemajuan zaman namun perubahan yang terjadi tidak beresiko menimbulkan sebuah gejolak sosial apalagi dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Dinas Koperasi, UKM, dan

Tenaga Kerja melakukan upaya menjaga kondisi perkembangan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Upaya menjaga stabilitas tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap mutu dan kualitas “Kendang Jimbe” agar sesuai dengan standar kelayakan mutu barang. Langkah lain yang dapat diambil oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja yaitu dengan menjembatani antara pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha agar dapat mendukung perkembangan UMKM “Kendang Jimbe” secara optimal dan stabil atau teratur.

Peran pemerintah sebagai stabilisator terlihat dari diturunkannya staf Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap mutu produk di gudang terminal barang. Mengenai akses permodalan, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja memberikan fasilitas sebagai upaya menjembatani antara pelaku usaha yang memerlukan modal dengan penyedia modal baik dari pihak bank maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar sudah menjalankan peran stabilisator dengan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang berupaya dalam menjalankan perannya untuk mengawasi mutu atau kualitas produk. Serta berhasilnya Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam menghubungkan pelaku UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dengan berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan permodalan.

### **2. Peran Sebagai Inovator**

Peran inovator pemerintah harus dijalankan sebagai sumber dari hal-hal baru yang menjadi gagasan pemerintah untuk memajukan daerahnya. Berkaitan dengan pengembangan UMKM, peran inovator pemerintah sangat berguna dalam

mengembangkan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar khususnya melakukan pembaruan pembaruan yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi pelaku usaha. Peran inovator Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar terhadap pengembangan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar berusaha diwujudkan dalam upaya memecahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemasaran dimana di zaman yang serba maju ini pemasaran secara offline dirasa kurang efektif sehingga Dinas Koperasi melakukan inovasi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan meluncurkan pelatihan terhadap pemasaran online.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengembangan UMKM di Kota Blitar khususnya UMKM “Kendang Jimbe” di kecamatan Kepanjenkidul selalu berupaya menciptakan hal baru untuk memecahkan sebuah permasalahan. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha adalah masalah pemasaran dimana jika dihadapkan dengan perkembangan zaman maka pemasaran secara offline dirasa kurang. Oleh sebab itu Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan solusi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan pemasaran secara online. Sosialisasi dan pelatihan telah diberikan kepada pelaku usaha. Pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan ahli dari bidangnya sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal. Hal ini juga disambut baik oleh pelaku usaha dimana peminat dalam pelatihan pemasaran online ini sangat banyak sehingga pelaksanaan pelatihan harus dibuat dalam beberapa sesi.

Berdasarkan hasil uraian pembahasan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar sudah menjalankan perannya dengan cukup baik. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar berhasil menciptakan hal baru

dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

**Gambar 1.1. Pelatihan pemasaran Online**



Sumber: Arsip Dokumentasi Dinas Koperasi, UM, dan tenaga Kerja

### **3. Peran Sebagai Modernisator**

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan peran modernisasi. Hal ini dibuktikan dengan telah diberikannya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Contoh dari pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan terhadap metode baru dalam pembuatan motif yang terdapat pada “Kendang Jimbe” yang sebelumnya hanya motif ukir sekarang telah diberikan pelatihan motif dengan cat. Pelatihan ini diberikan sebagai jawaban dari keresahan pelaku usaha ketika ada pesanan dalam jumlah banyak dan waktu yang diberikan tidak banyak.

Dengan adanya pelatihan motif cat maka pelaku usaha “Kendang Jimbe” dapat menawarkan “Kendang Jimbe” dalam motif cat yang pengerjaannya lebih singkat kepada pembeli. Namun walaupun dengan metode yang lebih modern namun tidak menghilangkan ciri khas dari produk “Kendang Jimbe” yang ditawarkan. Dan setelah mengikuti pelatihan tersebut pelaku usaha banyak yang menjual “Kendang Jimbe” dalam dua versi yaitu motif ukir dan motif cat.

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah menjalankan peran sebagai modernisator dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja dalam melakukan pelatihan salah satunya pelatihan metode pembuatan motif cat kepada SDM pelaku usaha “Kendang Jimbe”. Hasil dari pelatihan tersebut nyata yaitu diterapkannya motif cat pada penjualan “Kendang Jimbe” oleh pelaku usaha.

#### 4. Peran Sebagai Pelopor

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Dinas Koperasi dan UM kota Blitar menjalankan peran sebagai pelopor dengan memelopori pengadaan kegiatan bazar dan pameran sebagai upaya promosi terhadap produk UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe”. Pameran ini diikuti oleh produk-produk UMKM dari Kota Blitar dimana salah satunya yang mendapat banyak perhatian adalah “Kendang Jimbe”. Menurut (Nur, 2019) fungsi promosi antara lain adalah untuk mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli, Menciptakan dan menumbuhkan

interest pada diri calon pembeli, Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk memiliki barang yang di tawarkan. Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar terus mendorong pelaku UMKM “Kendang Jimbe” untuk berperan aktif dalam kegiatan promosi melalui pameran sehingga dapat membawa dampak positif bagi pelaku UMKM “Kendang Jimbe”.

Selain memelopori kegiatan pameran yang dilaksanakan di Kota Blitar, Dinas Koperasi dan UM senantiasa mendorong pelaku UMKM “Kendang Jimbe” untuk aktif dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan promosi produk sehingga produk UMKM “Kendang Jimbe” akan semakin terkenal baik di wilayah lokal maupun nasional.

#### Gambar 1.2. Pameran UMKM



Sumber : Dokumentasi Dinas Koperasi, UKM, dan tenaga Kerja

#### KESIMPULAN

Kesimpulan memberikan ringkasan penjelasan tentang hasil dan pembahasan. Berdasarkan dua hal tersebut, dikembangkan ide-ide baru yang merupakan inti dari temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam Pengembangan UMKM “Kendang Jimbe” di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, telah ditemukan hasil bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah menjalankan peran sebagai stabilisator melalui pengawasan mutu produk dan sosialisasi

akses bantuan permodalan dengan cukup baik. Selanjutnya Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan peran sebagai inovator dengan melakukan pelatihan pemasaran online sebagai solusi bagi permasalahan pemasaran dengan cukup baik. Sebagai modernisator, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan peran dengan membuat pelatihan SDM menggunakan metode produksi baru. Kemudian terakhir dalam menjalankan peran dilakukan, didapatkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan peran sebagai pelopor dengan memelopori pengadaan kegiatan bazar dan pameran sebagai upaya promosi terhadap produk UMKM khususnya UMKM “Kendang Jimbe”. Pameran ini diikuti oleh produk-produk UMKM dari Kota Blitar dimana salah satunya yang mendapat banyak perhatian adalah “Kendang Jimbe”. Selain memelopori kegiatan pameran yang dilaksanakan di Kota Blitar, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja senantiasa mendorong pelaku UMKM “Kendang Jimbe” untuk aktif dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah menjalankan peran sebagai pelopor dengan cukup baik. Dorongan dan tindakan nyata dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar telah membawa dampak positif bagi pelaku usaha “Kendang Jimbe” dimana pelaku usaha semakin terdorong untuk terus aktif dalam mengikuti program-program promosi yang ada sehingga dapat membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha mereka. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga aktif dalam memberikan informasi mengenai kegiatan promosi yang diselenggarakan baik dari pemerintah daerah lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

Fernando, N., Choiri, M., & Yanuarti, R. (2013).

Upaya Peningkatan Kualitas Produk Kendang Jimbe Menggunakan Qfd Dengan Mempertimbangkan Dampak Terhadap Lingkungan Product Quality Improvement Of Jimbe Drums Using Qfd By Considering The Environmental Effects. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem* , 1(2), 299–311.

Irawan, D. R. (2018). *Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe Oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga KerjaKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Hukum Islam (Studi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga KerjaKM dan Pengrajin Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* ((3rd Editi). New York:SAGE.

Nugraha, B. A. (2020). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Marka Larangan Parkir Atau Berhenti (Garis Berbiku – Biku Berwarna Kuning) Di Kota Surabaya” (Analisis Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan Pasal 43)*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Nur, M. I. (2019). *Analisis Peranan Promosi Dalam Menunjang Keberhasilan Penjualan Pada Pt. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk Cabang Gowa Sungguminasa*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Subiantoro, J. R. (2019). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Program One Village One Product Kendang Jimbe Di Kota Blitar*. Skripsi, Universitas Airlangga.